



MEKANISME KOORDINASI PEMBERDAYAAN PRODUSEN GENTENG MELALUI KEBIJAKAN GENTENGISASI NASIONAL DI KABUPATEN MAJALENGKA

Heru Sulistiyo^{1*}, Abdurohim², M. Rifa'F³

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km.20 Jatinangor 45363, Indonesia; email: herusulistiyo@ipdn.ac.id

*Correspondence

Received: 15-04-2025; Accepted: 5-06-2026; Published: 30-6-2026

Abstract: *The "national roof-tile adoption" policy part of a national movement to create an ASRI (Safe, Healthy, Clean, and Beautiful) Indonesian environment presents a unique challenge for local governments in regions with roof-tile producers. This policy has the potential to empower roof-tile businesses and generate multiplier effects, particularly at a time when the industrial sector is sluggish. Issues surrounding roof-tile production such as meeting market demand, ensuring product standardization, and addressing aesthetic qualities can be effectively managed with government support. This study aims to analyze the coordination mechanisms employed by the government in response to this national policy. The study employs a qualitative, descriptive analytical approach, utilizing both primary and secondary data. Primary data were gathered directly in the field through observation and interviews, while secondary data were obtained from existing documentation and sources, such as articles and digital data available online. The findings indicate that an empirical approach was used to assess actual conditions on the ground, a normative approach was applied to establish a support team for handling production certification, and a functional approach was utilized to coordinate the various parties involved. The collective coordination scheme for empowering roof-tile artisans facilitated through institutional mechanisms is considered effective; it meets the artisans' expectations by helping them avoid cutthroat competition among enterprises. In addition, collective coordination mechanisms can jointly address market needs regarding producers' capacity to meet demand, product quality standardization, and the aesthetic aspects of roof tile designs that align with consumer requirements.*

Keywords: *Roof Tiles, Mechanism, Coordination and Institutional*

Abstrak: Kebijakan “gentengisasi nasional” sebagai bagian dari Gerakan Nasional untuk menciptakan lingkungan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang memiliki produsen genteng. Kebijakan ini dapat memberdayakan para pelaku usaha genteng dan memiliki *multiplier effect* di saat sektor

industri yang sedang lesu. Masalah produksi genteng berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasar, standarisasi produk, dan unsur estetika, yang hal tersebut bisa dicukupi apabila ada pendampingan dari pemerintah. Tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam merespon kebijakan nasional tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis dan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer didapat secara langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan sumber lain yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk artikel atau data digital yang tersedia di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan empirik dilakukan untuk mengetahui kondisi real di lapangan, dan pendekatan normatif dilakukan untuk membentuk tim pendamping dalam pengurusan sertifikat produksi, sedangkan pendekatan fungsional dilakukan untuk koordinasi antar pihak. Skema kolektif koordinasi pemberdayaan pengrajin genteng melalui mekanisme kelembagaan dianggap efektif karena dapat memenuhi harapan para pengrajin genteng dalam menghindari persaingan yang keras antar perusahaan. Selain hal tersebut, mekanisme koordinasi secara kolektif juga dapat menjawab kebutuhan pasar secara bersama-sama berkaitan dengan kemampuan produsen dalam memenuhi permintaan, standarisasi kualitas produk, dan aspek estetika bentuk genteng sesuai kebutuhan konsumen.

Kata-kata Kunci: *Gentengisasi, Mekanisme, Koordinasi dan Kelembagaan*

A. Pendahuluan

Hanya ada dua tugas pemerintah, yaitu menghadirkan kebijakan yang unggul dan memberikan pelayanan publik yang bermutu. Bagi pemerintah, membangun kebijakan publik unggul menjadi tantangan pertama, karena tugas kebijakan publik adalah membangun rakyat, sehingga rakyat biasa dapat bekerja dengan luar biasa, dan mengubah negara biasa menjadi negara luar biasa. Inilah tantangan terberat bagi pemerintahan semua negara berkembang. (Nugroho, 2022: 83).

Kebijakan pemerintah tentang Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata memerlukan koordinasi berbagai pihak agar tercipta sinergitas. Dengan kata lain sinergitas menjadi kunci implementasi kebijakan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan unsur pemerintah itu sendiri baik di tingkat pusat maupun daerah dan sektor swasta dan masyarakat. Gagasan kebijakan “gentengisasi” sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) guna menciptakan keindahan lingkungan permukiman telah diluncurkan dan mendapatkan respon dari masyarakat dengan berbagai macam sudut pandang. Ditegaskan bahwa gentengisasi bukan program *charity*. Melainkan program berkelanjutan dalam pemberdayaan para produsen genteng sebagai pelaku usaha yang memiliki *multiplier effect*. Pemerintah juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi

harus bersifat inklusif dan mensejahterakan semua pihak. Kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat.

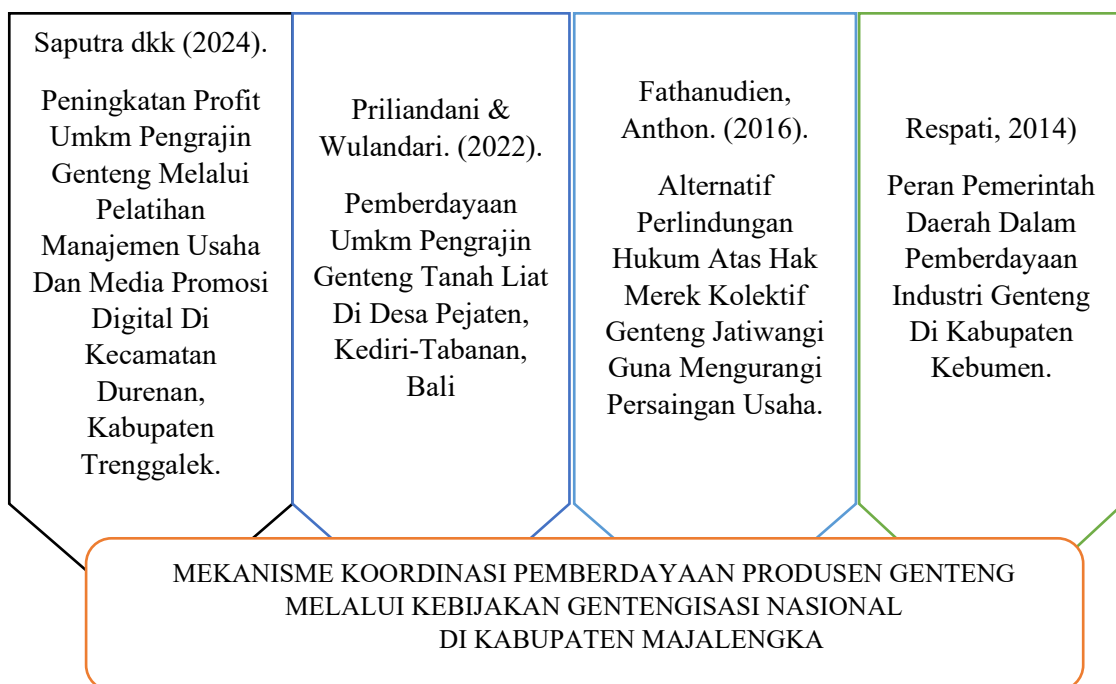
Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang dikenal memiliki ikon industri genteng, khususnya di Kecamatan Jatiwangi yang menjadi pusat dan cikal bakal produksi genteng, disusul oleh Kecamatan Dawuan, Kecamatan Kasokandel, dan Kecamatan Sukahaji. Sejak tahun 1980-an hingga awal milenium, genteng Jatiwangi telah menjadi merek dagang yang memasok pasar di berbagai daerah di Indonesia. Di Kecamatan Jatiwangi sendiri, produk dari tanah liat tersebut menjadi urat nadi ekonomi, identitas sosial budaya, dan jati diri karena genteng diyakini sebagai pahlawan peneduh karena memayungi setiap sekolah, rumah sakit, dan rumah penduduk. Menyadari bahwa genteng sudah mandarah daging dalam kehidupan sosial akhirnya melahirkan budaya ikonik seperti kegiatan kesenian rampak genteng dan perlombaan binaraga Jebor.

Seiring perjalanan waktu dan perkembangan kondisi sosial masyarakat, industri genteng Jatiwangi juga mulai mengalami masa-masa sulit. Penurunan produksi yang dalam kejayaannya setiap harinya dapat mencapai 4 juta keping, sejak tahun 2005 capaiannya terus menurun hanya kisaran 600 ribu keping per harinya. (bandung.kompas.com). Menurunnya produksi tersebut disebabkan banyaknya tenaga kerja yang beralih menjadi pekerja pabrik garmen dan konveksi sehingga banyak usaha genteng yang gulung tikar. (antarafoto.com). Keterlambatan adaptasi dengan teknologi produksi modern juga bagian dari penyebab merosotnya produksi genteng. (bandung.kompas.com). Pelaku usaha lainnya menyampaikan bahwa terpuruknya industri genteng juga disebabkan oleh bahan baku yang terus naik, pasar lesu, dan adanya industri pesaing seperti genteng spandex, yaitu genteng yang terbuat dari bahan metal, ditambah lagi kehadiran industri garmen dari Korea yang mengambil para pekerja perempuan di pabrik genteng. (scribd.com).

Beberapa penelitian dengan tema yang sama yang sudah dilakukan sebelumnya diuraikan disini untuk dijadikan referensi guna mengetahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian (Saputra dkk, 2024) tentang UMKM pengrajin genteng di Kabupaten Trenggalek dengan hasil, untuk peningkatan profit diperlukan pelatihan manajemen usaha dan media promosi digital agar memiliki keunggulan kompetitif. Hasil penelitian (Fathanudien, 2016) melihat dari sisi legalitas produk genteng di Kabupaten Majalengka untuk menghadapi persaingan global yang hasilnya menunjukkan industri genteng memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat karena menyerap tenaga yang cukup besar. Keberadaan industri genteng agar tetap eksis, perlu kehadiran pemerintah dalam mengurangi persaingan usaha dengan memberikan perlindungan dalam bentuk merek kolektif dan pemasaran

bersama. Merek suatu produk menjadi sangat penting peranannya sehingga perlu sistem pengaturan yang lebih memadai. Penelitian (Wulandari dan Priliandini, 2022) membahas dari sisi pemberdayaan dalam konsep kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya membantu memahami tata kelola perusahaan terutama dalam hal menentukan strategi produksi dan pemasaran, membuat pembukuan atau catatan terkait dengan transaksi pendapatan, pengeluaran, serta biaya produksi dan harga pokok produksi, sehingga mitra mengetahui secara pasti laba dan rugi usaha melalui program kemitraan masyarakat. Sedangkan penelitian (Respati, 2014) tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri genteng di kabupaten kebumen. Hasil penelitian menunjukkan meskipun berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi industri genteng, namun masalah bahan baku, tenaga kerja dan manajemen usaha masih menjadi kendala utama yang dikeluhkan pengusaha genteng. Tidak hanya pengusaha genteng yang mengalami hambatan dalam mengembangkan bisnisnya, pemerintah daerah sendiri juga mengalami hambatan dalam mengimplementasikan programnya seperti komunikasi dan sumberdaya.

Pemahaman sederhana dari uraian di atas dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:



Gambar: Diagram Penelitian Terdahulu

Mencermati ke-empat penelitian yang telah dilakukan terdapat persamaan berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan dalam bentuk manajemen usaha, tata kelola dan strategi pemasaran, serta keterlibatan pemerintah untuk perlindungan produk agar tetap eksis

keberadaannya. Namun terdapat perbedaan mendasar berkaitan dengan mekanisme koordinasi dalam proses pemberdayaannya, yang sama sekali tidak dibahas di penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji proses pemberdayaan dengan menjelaskan mekanisme koordinasi yang diupayakan oleh pemerintah daerah sebagai respon dari kebijakan gentengisasi nasional di Kabupaten Majalengka.

B. Kerangka Teori

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memfasilitasi setiap koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas suatu program kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki sumber daya yang terorganisir dalam birokrasi, anggaran, dan kewenangan. Fasilitasi dilakukan mengingat pergeseran paradigma pemerintahan yang memposisikan pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana pendapat Ndraha (2010: 3) yang memaknai pemerintahan sebagai interaksi antara tiga subkultur yang dinamakan Subkultur Ekonomi (SKE), Subkultur Kekuasaan (SKK), dan Subkultur Sosial (SKS). SKE pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat dalam usahanya memenuhi segala macam kebutuhan hidup. Terdapat kebutuhan hidup yang dapat dipenuhi secara mandiri dan ada sebagian kebutuhan hidup yang untuk mencukupinya perlu pengaturan pihak lain yang memiliki otoritas. Oleh karenanya diperlukan kehadiran subkultur lain yaitu Subkultur Kekuasaan (SKK) yang dijalankan oleh pemerintah. Kehadiran SKK disamping untuk memenuhi kebutuhan SKE, juga melakukan kontrol terhadap kegiatan ekonomi agar tidak terjadi monopoli oleh para pemilik modal. Namun demikian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya SKK juga memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan sehingga perlu kontrol eksternal dari masyarakat yang disebut Subkultur Sosial (SKS).

Uraian diatas memberi gambaran kepada publik bahwa setiap kebijakan dalam implementasinya dapat dipastikan melibatkan berbagai sektor, sehingga perlu ada koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat masalah terpenting yang dihadapi pemerintah saat ini adalah lintas batas tanggung jawab departemen, maka perlu koordinasi lintas sektoral. Adapun mekanisme untuk mencapai koordinasi lintas sektor diuraikan oleh Peters (2018) dapat melalui dimensi 1) *Networks*, 2) *Collaboration*, dan 3) *Hierarchy*. Meskipun demikian diakui bahwa ketiga dimensi tersebut bukanlah satu-satunya jalan menuju koordinasi yang efektif, karena keberhasilan koordinasi juga tergantung pada bentuk-

bentuk koordinasi yang diterapkan secara *top-down*, sementara bentuk-bentuk koordinasi lainnya mungkin lebih banyak terjadi melalui interaksi individu dan tawar-menawar di antara para aktor yang terlibat. Sebagaimana dijelaskan Ndraha (2011) bahwa koordinasi merupakan kebutuhan semua pihak sehingga bisa dilakukan sewaktu-waktu dan tidak selalu harus ada koordinator.

Pemerintah sebagaimana pendapat Peters (2018) telah menginvestasikan banyak waktu dan energi dalam upaya mencapai koordinasi yang lebih baik, dan memiliki sejumlah mekanisme yang dapat mereka gunakan. Semua mekanisme memiliki bermacam manfaat, akan tetapi tidak ada yang menjadi obat mujarab. Sependapat dengan Peters tentang jaringan sosial (*network*) dan kepercayaan (*trust*) sebagai dimensi mekanisme koordinasi juga disampaikan Putman, (1993) dalam memfasilitasi kerja sama masyarakat untuk keuntungan bersama. Kerja sama dipandang sebagai aset kolektif akan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan demokrasi.

Pemerintah yang telah menginvestasikan banyak waktu dan energi untuk mencapai koordinasi yang lebih baik sebagaimana disampaikan Ndraha (2011: 290) dalam koordinasi pemerintahan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan empirik, pendekatan normatif, dan pendekatan fungsional. Koordinasi dengan pendekatan empirik dilakukan oleh pihak-pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga tidak merugikan antar pihak melainkan saling mendukung. Koordinasi normatif diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Sedangkan koordinasi dengan pendekatan fungsional dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Melihat permasalahan penelitian yang melibatkan masyarakat dalam konteks terbatas yaitu Subkultur Ekonomi (SKE) para pengrajin genteng, maka dipandang lebih tepat apabila dikaji dengan teori Ndraha tentang koordinasi pemerintahan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan empirik, pendekatan normatif, dan pendekatan fungsional mengingat inisiasi kebijakan gentengisasi dari pemerintah yang langsung disertai dengan atribut kebijakan-kebijakan hilirisasi produksi mulai dari proses pembuatan sampai dengan pemasaran yang melibatkan kelembagaan di daerah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam, terutama terkait dengan responsivitas Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengkoordinasikan program nasional gentengisasi. Jenis deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara jelas langkah-langkah yang telah diambil, tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan dari implementasi program tersebut, kemudian menganalisisnya untuk menarik kesimpulan yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yang didapat secara langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari pihak lain yang dianggap masih relevan dengan obyek penelitian melalui dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan sebagaimana pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan.

Kebijakan pemerintah pusat tentang “Gentengisasi nasional” langsung ditindaklanjuti dalam bentuk alokasi pemesanan genteng yang dibutuhkan untuk tahap awal, baik oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah provinsi, maupun program perumahan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui sekretaris daerah mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan gentengisasi dengan mengalokasikan program perbaikan rumah sebanyak 250 unit yang berarti membutuhkan biaya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per rumah, maka potensi belanja genteng mencapai sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan Kabupaten Majalengka berencana membangun rumah bersubsidi sebanyak 3000 unit di tahun 2026. Program ini memprioritaskan penggunaan genteng tanah liat dari industri lokal Jatiwangi, dengan harapan bisa menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian setempat. Selain itu, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, direncanakan ada 900 rumah di Majalengka yang akan diperbaiki. Program tersebut diperkirakan membutuhkan genteng dengan nilai sekitar Rp 1 miliar. Dengan berbagai program tersebut, total komitmen transaksi penyerapan genteng dari sentra pabrik genteng di Jatiwangi diperkirakan mencapai sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Dukungan terhadap program gentengisasi juga datang dari sektor swasta untuk proyek perumahan subsidi yang sedang dibangun di Bogor dan Serang. Termasuk komitmen pribadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan memesan tambahan 10 (sepuluh) truk genteng yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah prajurit TNI sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Dukungan pemerintah melalui kebijakan gentengisasi membuat industri genteng di Kabupaten Majalengka khususnya di Kecamatan Jatiwangi kembali menggeliat dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendukung program gentengisasi nasional mengambil langkah-langkah konkrit; *Pertama*, dengan melakukan pendataan pabrik genteng hingga analisis kendala produksi yang dihadapi pelaku usaha. Hasil pendataan menunjukkan perlunya peningkatan standarisasi produk, akses permodalan, serta penguatan legalitas usaha. *Kedua*, melakukan pendampingan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), dan kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional untuk memastikan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hasilnya tercatat delapan pabrik genteng di Majalengka yang telah memperoleh sertifikat SNI sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini:

Tabel 1:
Daftar Pabrik Genteng (SNI)

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Sertifikat Standar Nasional (SNI)
1.	Mahkota	Majalengka	SNI
2.	Tri Ade Eef	Majalengka	SNI
3.	EFA Super	Majalengka	SNI
4.	CV Haji Idris	Majalengka	SNI
5.	Sinar Gemilang Royalti	Majalengka	SNI
6.	IKI Barkah	Majalengka	SNI
7.	Pratama Mandiri	Majalengka	SNI
8.	SM Perdana	Majalengka	SNI

Disamping data di atas terdapat 35 (tiga puluh lima) pabrik genteng yang telah dinyatakan lolos uji fisik oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam. *Ketiga*, pemerintah Kabupaten Majalengka juga

melakukan kerja sama dengan perbankan pemerintah untuk mempermudah akses dan penguatan permodalan untuk peningkatan kapasitas produksi serta daya saing pengusaha genteng Jatiwangi. Ketiga langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam merespon kebijakan pemerintah pusat tersebut memerlukan koordinasi yang melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Koperasi Pengrajin Genteng Jatiwangi (Kopegja), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II, dan Balai Besar Keramik, serta pihak perbankan.

Koordinasi dibangun dalam kerangka manajemen yang dalam prosesnya memerlukan input sebagaimana pola komunikasi. Kebijakan nasional gentengisasi dengan segala harapan dan tantangannya bisa dipandang sebagai input bagi pemerintah daerah yang perlu segera direspon keberlanjutannya. Diantara tantangan utama yang perlu disikapi adalah tuntutan pasar, yaitu 1) komitmen produsen dalam memenuhi permintaan, 2) kualitas produk harus berstandar, 3) aspek estetika atau bentuk genteng sesuai kebutuhan konsumen. Proses penyesuaian dalam menyikapi input memerlukan kelengkapan atau alat yang bentuknya bisa melalui keputusan bupati, keputusan rapat, surat undangan atau pemberitahuan, serta rapat pertemuan antar pihak yang berkepentingan untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan.

Mekanisme koordinasi didorong dalam bentuk skema kolektif melalui penguatan kelembagaan dengan membentuk Koperasi Pengrajin Genteng Jatiwangi (Kopegja) agar produksi dan pemasaran dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Misalnya untuk memenuhi permintaan konsumen sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka perlu koordinasi antara para pengusaha genteng yang terhimpun dalam Koperasi Pengrajin Genteng Jatiwangi (Kopegja) dengan BP3KP Jawa II dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk memastikan ketersediaan material agar suplai dapat dihimpun dari beberapa pengrajin dengan standar kualitas yang sama. Selanjutnya untuk mendapatkan produksi genteng yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui proses pengujian dan sertifikasi, melalui koperasi pengrajin genteng mereka berkomitmen untuk mengurus secara bersama-sama, yang hal tersebut semakin memudahkan Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan koordinasi dengan Balai Besar Keramik Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pemenuhan tuntutan dari sudut estetika, para pengrajin genteng juga berupaya menyesuaikan dengan daya tahan yang mencapai lebih dari tiga puluh tahun dengan kondisi genteng tetap mengkilap.

Uraian di atas telah sejalan dengan pendapat Ndraha tentang koordinasi dengan tiga pendekatan (empirik, normatif, dan fungsional). Pendekatan empirik dilakukan diawal dengan mendatangi secara langsung lokasi pembuatan genteng untuk dilakukan pendataan sekaligus untuk mengetahui kondisi real di lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan membentuk tim pendamping dalam pengurusan sertifikat produksi, sedangkan pendekatan fungsional dilakukan dengan koordinasi antar pihak yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sebagaimana telah dijelaskan pelaksanaan koordinasi dalam pemenuhan permintaan konsumen, koordinasi pengurusan SNI, termasuk juga koordinasi untuk penguatan modal usaha, maka koperasi pengrajin genteng dengan difasilitasi pemerintah daerah dapat memanfaatkan skema pembiayaan produksi yang dikoordinasikan dengan pihak perbankan.

E. Kesimpulan

Koordinasi sebagai salah satu unsur dari fungsi-fungsi manajemen dapat dilihat dari sisi fungsi dan sisi kelembagaan. Konsep mekanisme koordinasi yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pemberdayaan pengrajin genteng di Kecamatan Jatiwangi cenderung mengedepankan koordinasi kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari skema kolektif koordinasi yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Koperasi Pengrajin Genteng Jatiwangi (Kopegja), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II, serta Balai Besar Keramik Provinsi Jawa Barat dan pihak perbankan.

Kecenderungan persaingan bebas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya merupakan karakter yang melekat pada organisasi privat yang dapat menjadi faktor penghambat koordinasi. Oleh karena itu mekanisme koordinasi kelembagaan yang didorong oleh pemerintah dengan membentuk Koperasi Pengrajin Genteng Jatiwangi (Kopegja) sangat efektif dalam menjawab tantangan kebijakan nasional gentengisasi. Skema kolektif melalui koordinasi kelembagaan dapat memenuhi harapan pengusaha dengan indikator peningkatan jumlah produksi dan disisi lainnya dapat menghindari persaingan yang keras antar perusahaan. Selain hal tersebut tantangan berkaitan dengan kemampuan produsen dalam memenuhi permintaan, standarisasi kualitas produk, dan aspek estetika bentuk genteng agar sesuai kebutuhan konsumen dapat diatasi bersama-sama.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Bouckaert, Geert. Peters, B. Guy and Verhoest, Koen. (2010). *The Coordination of Public Sector Organizations Shifting Patterns of Public Management*. Published by PALGRAVE MACMILLAN

Creswell, John W. (2013). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Third Edition. SAGE publications. Thousand Oaks California 91320.

Peters, B. Guy (2018) *The challenge of policy coordination, Policy Design and Practice*, 1:1, 1-11, DOI: 10.1080/25741292.2018.1437946

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta,

Ndraha, Taliziduhu. (2010). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Tangerang: Sirao Credentia Center.

Nugroho, Riant. (2022). *Tugas Pemerintah (Konsep, Teori, Praktik)*. Jakarta: Elex Media Computindo.

Jurnal:

Fathanudien, Anthon. (2016). Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016.

Priandani, Ni Made Intan. Wulandari, I Gusti Ayu Athina. (2022). Pemberdayaan Umkm Pengrajin Genteng Tanah Liat Di Desa Pejaten, Kediri-Tabanan, Bali Akuntansi dan Humaniora: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akutansi Humaniora (Juni–September 2022)*. Vol. 1 No. 2 (2022).

Saputra, I Nyoman. Basuki, Andi. Dharma, Buyung Adi. Sakdiyyah, Dewi Ayu. (2024). Peningkatan Profit Umkm Pengrajin Genteng Melalui Pelatihan Manajemen Usaha Dan Media Promosi Digital Di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM> DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i2.3550>

Respati, Bagus Daru Hari. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Genteng Di Kabupaten Kebumen. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/5040/4871>

Sumber lainnya:

<https://www.antarafoto.com/id/view/1540605/kendala-produksi-genting-jatiwangi> dikutip Hari Jumat tanggal 10 April 2026 jam 22.44 wib.

<https://www.scribd.com/document/389650026/genting-jatiwangi> dikutip Hari Jumat tanggal 10 April 2026 jam 22.55 wib.

<https://radarmajalengka.disway.id/kabupaten-majalengka/read/673809/pemda-majalengka-percepat-standarisasi-genteng-jatiwangi-untuk-program-nasional>

<https://bandung.kompas.com/read/2026/02/09/095537278/genteng-jatiwangi-urat-nadi-ekonomi-majalengka-yang-bertahan-lebih-dari?page=all>.

<https://pkp.go.id/balai/p2p-jawa-ii/berita/detail/koordinasi-gentengisasi-untuk-program-bedah-rumah-bsps-jawa-barat>

<https://pkp.go.id/berita/detail/program-gentengisasi-dorong-umkm-genteng-jatiwangi-bangkit>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/6287908/program-gentengisasi-umkm-majalengka-siap-penuhi-kebutuhan-nasional>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).